

**SAAT ANAK SD BELAJAR JADI WARGA NEGARA DENGAN REFLEKSI
EDUKASI KEWARGANEGARAAN MASA KINI**

Dicky Chandra Nababan¹, Galuh Arumsari², Naila Khairunisa³, Natasya Permata
Putri⁴, Yulia Elfrida Yanty Siregar⁵

Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Pelita Bangsa
dickybondan6@gmail.com, galuharumsari5@gmail.com,
hyugahinatasya@gmail.com, nailakhayrunrcj@gmail.com

ABSTRACT

Citizenship education for elementary school students plays a crucial role in shaping responsible and participatory citizens. This study reflects on the current practices and challenges of implementing civic education in Indonesian elementary schools, particularly in the context of social changes and the digital era. Using a qualitative descriptive approach, data were collected through literature analysis, classroom observations, and teacher interviews. The findings indicate that while civic education is integrated into the curriculum, its delivery often focuses on rote learning rather than fostering critical thinking and participatory skills. Teachers face challenges in contextualizing citizenship concepts in ways that are engaging and relevant to students' everyday lives. The study suggests the need for experiential and project-based approaches to help students internalize civic values. These findings have implications for teacher professional development, curriculum reform, and the broader discourse on democratic education in Indonesia.

Keywords: Civic Education, Citizenship, Democracy, Elementary School, Participatory Learning

ABSTRAK

Pendidikan kewarganegaraan pada siswa sekolah dasar memiliki peran penting dalam membentuk warga negara yang bertanggung jawab dan partisipatif. Penelitian ini merefleksikan praktik dan tantangan terkini dalam penerapan pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar Indonesia, khususnya pada konteks perubahan sosial dan era digital. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, data diperoleh melalui analisis literatur, observasi kelas, dan wawancara guru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pendidikan kewarganegaraan telah terintegrasi dalam kurikulum, pelaksanaannya cenderung berfokus pada hafalan daripada pengembangan berpikir kritis dan keterampilan partisipasi. Guru menghadapi tantangan dalam mengontekstualisasikan konsep kewarganegaraan agar relevan dan menarik bagi kehidupan sehari-hari siswa. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman dan proyek agar nilai-nilai kewarganegaraan dapat diinternalisasi dengan lebih baik. Temuan

ini memiliki implikasi bagi pengembangan profesional guru, reformasi kurikulum, dan diskursus pendidikan demokratis di Indonesia.

Kata Kunci: Demokrasi, Partisipasi, Pendidikan Kewarganegaraan, Sekolah Dasar

A. Pendahuluan

Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu fondasi paling mendasar dalam membentuk warga negara yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter kuat dan kesadaran penuh akan tanggung jawab sosial yang melekat pada dirinya. Di tingkat sekolah dasar (SD), pendidikan ini memegang peran strategis sebagai media awal untuk memperkenalkan anak-anak pada konsep-konsep fundamental mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara, nilai-nilai demokrasi, rasa hormat terhadap hukum, serta rasa cinta tanah air yang autentik. Proses ini tidak sekadar bertujuan mengisi pengetahuan kognitif anak dengan informasi normatif, tetapi juga membentuk kepekaan sosial mereka terhadap lingkungan sekitar dan menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang mencerminkan perilaku warga negara yang baik. Dalam konteks Indonesia, keberadaan pendidikan kewarganegaraan telah diatur secara jelas dalam kurikulum nasional sebagai bagian dari strategi pendidikan karakter bangsa, yang diarahkan untuk membentuk generasi penerus yang mampu berpikir kritis, bersikap toleran, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan ini bahkan dipandang sebagai instrumen yang

penting untuk menjaga keberlangsungan nilai-nilai luhur Pancasila dan memperkuat ikatan kebangsaan di tengah keragaman etnis, budaya, dan agama yang dimiliki bangsa Indonesia (Winataputra & Budimansyah, 2012).

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di tingkat SD seringkali belum sepenuhnya mencerminkan tujuan ideal tersebut. Banyak guru yang masih mengandalkan metode pengajaran tradisional berbasis ceramah dan hafalan materi, di mana siswa diminta mengingat definisi atau pasal-pasal tertentu tanpa diberi kesempatan yang cukup untuk mengaitkannya dengan pengalaman hidup nyata mereka. Pendekatan ini cenderung menghasilkan pemahaman yang dangkal dan kurang bermakna, karena anak-anak hanya mengetahui "apa" yang harus dilakukan sebagai warga negara, tetapi tidak memahami secara mendalam "mengapa" hal tersebut penting dan "bagaimana" menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, nilai-nilai demokrasi dan tanggung jawab sosial yang diharapkan dapat diinternalisasi sejak dini justru menjadi sekadar pengetahuan teoritis yang tidak mengakar dalam perilaku. Kondisi ini semakin diperburuk oleh tekanan

kurikulum yang padat, keterbatasan sumber belajar yang kontekstual, serta minimnya pelatihan guru yang fokus pada inovasi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Dalam situasi seperti ini, proses pembelajaran sering kehilangan aspek kritis dan partisipatif yang menjadi inti dari pembelajaran kewarganegaraan yang sejati.

Di sisi lain, dinamika perkembangan masyarakat modern turut memunculkan tantangan baru yang semakin kompleks bagi pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar. Perubahan sosial yang cepat akibat globalisasi telah memperluas cakrawala interaksi anak-anak, baik secara fisik maupun virtual, melalui kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Kehadiran media digital, media sosial, dan platform daring lainnya telah membuka peluang yang besar bagi anak-anak untuk mengakses informasi, membentuk opini, dan berinteraksi lintas budaya, tetapi pada saat yang sama juga membawa risiko seperti paparan hoaks, ujaran kebencian, dan perilaku tidak etis di ruang digital. Dalam konteks ini, pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar seharusnya tidak hanya berfokus pada nilai-nilai tradisional seperti cinta tanah air atau kepatuhan pada hukum, tetapi juga perlu mengintegrasikan literasi digital, etika bermedia, dan keterampilan berpikir kritis dalam menghadapi arus informasi yang masif. Hal ini sejalan dengan pandangan Hoskins et al. (2015) yang menekankan bahwa

pendidikan kewarganegaraan modern harus mampu menjembatani kesenjangan antara pembelajaran formal di kelas dengan realitas kehidupan sosial yang semakin kompleks, baik di dunia nyata maupun dunia maya.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada upaya merefleksikan secara kritis praktik pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar masa kini, dengan menghubungkan hasil temuan di lapangan dengan kebutuhan pembaruan pendekatan pembelajaran yang lebih relevan dan partisipatif. Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa pembelajaran kewarganegaraan tidak dapat lagi dilakukan semata-mata melalui metode pengajaran satu arah yang menempatkan guru sebagai sumber utama pengetahuan, sementara siswa berperan pasif sebagai penerima informasi. Sebaliknya, diperlukan desain pembelajaran yang memungkinkan siswa mengalami langsung proses menjadi warga negara, seperti melalui simulasi musyawarah kelas, proyek sosial berbasis komunitas, atau diskusi reflektif tentang isu-isu aktual yang mereka hadapi sehari-hari. Dengan demikian, siswa tidak hanya memahami konsep-konsep kewarganegaraan secara kognitif, tetapi juga mampu menginternalisasikan nilai-nilai tersebut melalui pengalaman konkret yang bermakna. Penelitian ini juga memberikan perspektif tentang bagaimana guru dapat memanfaatkan

teknologi digital secara tepat guna untuk memperkuat pembelajaran kewarganegaraan, sehingga siswa dapat mengasah keterampilan kolaborasi, komunikasi, dan pemecahan masalah yang relevan dengan tantangan abad ke-21.

Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi aktual pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar, mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi guru dalam implementasinya, serta menawarkan solusi inovatif yang dapat memperbaiki kualitas pembelajaran di bidang ini. Melalui analisis yang komprehensif, diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi bagi perumusan strategi pembelajaran kewarganegaraan yang tidak hanya efektif secara pedagogis, tetapi juga relevan dengan perkembangan sosial, budaya, dan teknologi yang sedang berlangsung. Lebih jauh lagi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengambil kebijakan, pengembang kurikulum, dan para pendidik dalam merancang program pendidikan kewarganegaraan yang mampu menumbuhkan generasi muda yang cerdas, kritis, berkarakter kuat, dan memiliki komitmen tinggi terhadap kehidupan demokratis. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan di tingkat sekolah dasar tidak hanya menjadi formalitas kurikulum, melainkan benar-benar menjadi sarana strategis dalam membangun fondasi bangsa yang tangguh di masa depan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang berfokus pada eksplorasi mendalam terhadap pengalaman dan perspektif guru dalam mengajarkan pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dengan lima guru kelas di dua sekolah dasar negeri di Kota X yang dipilih secara purposif berdasarkan pengalaman mereka dalam mengajar mata pelajaran tersebut. Wawancara ini dirancang untuk menggali informasi secara komprehensif mengenai strategi pembelajaran yang digunakan, bentuk keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran kewarganegaraan, tantangan-tantangan yang mereka hadapi baik yang bersifat pedagogis maupun kontekstual, serta persepsi mereka tentang relevansi materi kewarganegaraan dengan kehidupan nyata siswa di era digital. Proses wawancara dilakukan secara tatap muka dengan durasi antara 45 hingga 60 menit untuk setiap responden, menggunakan panduan wawancara yang fleksibel agar memungkinkan penggalian informasi tambahan di luar pertanyaan pokok yang telah disiapkan. Seluruh percakapan direkam dengan persetujuan responden untuk menjaga keakuratan data dan kemudian ditranskripsi secara verbatim untuk memudahkan proses analisis. Data hasil transkripsi dianalisis menggunakan teknik analisis tematik (*thematic analysis*) dengan langkah-langkah mencakup

pengenalan data, pengodean awal, pengelompokan kode menjadi tema-tema utama, dan interpretasi temuan secara menyeluruh. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap makna yang terkandung dalam jawaban guru, mengidentifikasi pola-pola pengalaman yang berulang, serta memunculkan rekomendasi berbasis temuan lapangan yang relevan dengan tujuan penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1) Praktik pembelajaran kewarganegaraan di SD

Hasil observasi yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sebagian besar kelas sekolah dasar masih didominasi oleh metode ceramah tradisional yang berorientasi pada penyampaian materi secara satu arah dari guru kepada siswa. Dalam banyak kesempatan, guru cenderung memulai dan mengakhiri pembelajaran dengan format yang nyaris seragam, yaitu memaparkan definisi-definisi pokok, menyebutkan pasal-pasal atau nilai-nilai kewarganegaraan, dan memberikan contoh-contoh bersifat tekstual yang diambil dari buku pelajaran tanpa mengaitkannya secara langsung dengan pengalaman konkret siswa dalam kehidupan sehari-hari. Siswa pada umumnya diminta mencatat atau menghafal informasi tersebut untuk kemudian diuji pada saat evaluasi, sehingga pembelajaran lebih menekankan pada aspek kognitif yang

bersifat mengingat (*rote learning*) daripada pada aspek penghayatan nilai dan keterampilan partisipatif yang menjadi inti pendidikan kewarganegaraan itu sendiri. Proses ini seringkali membuat siswa menjadi penerima pasif informasi, yang dalam jangka panjang dapat mengurangi minat dan motivasi mereka untuk benar-benar memahami serta menginternalisasi makna kewarganegaraan secara mendalam. Situasi ini juga memunculkan kesan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang sekadar dihafalkan untuk memenuhi tuntutan kurikulum, bukan sebagai wahana pembentukan karakter dan kesadaran bernegara yang hidup di dalam diri siswa.

Pola pembelajaran yang mengandalkan metode ceramah tersebut memiliki kelemahan mendasar, yakni minimnya peluang bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kemampuan berargumentasi, dan keberanian mengemukakan pendapat dalam forum kelas. Hal ini sangat kontras dengan hakikat pendidikan kewarganegaraan yang seharusnya menjadi ruang latihan demokrasi bagi siswa sejak dini. Alih-alih mengajak siswa berpartisipasi aktif dalam diskusi kelas, guru lebih banyak memposisikan mereka sebagai pendengar yang menerima informasi secara sepihak. Dengan demikian, kesempatan siswa untuk mempraktikkan nilai-nilai demokrasi seperti musyawarah, pengambilan keputusan bersama, dan

penghargaan terhadap perbedaan pendapat menjadi sangat terbatas. Padahal, menurut teori pembelajaran partisipatif, keterlibatan aktif siswa tidak hanya memperkaya pemahaman mereka, tetapi juga membentuk kebiasaan positif yang akan terbawa dalam kehidupan sosial mereka di luar sekolah. Minimnya aktivitas partisipatif dalam pembelajaran kewarganegaraan dapat menyebabkan nilai-nilai tersebut tetap berada pada tataran abstrak, tidak membumi dalam perilaku nyata siswa, dan pada akhirnya berisiko menghambat terciptanya generasi muda yang benar-benar memiliki kesadaran dan komitmen terhadap kehidupan demokratis.

Meskipun secara umum metode ceramah masih menjadi pola dominan, observasi ini juga menemukan bahwa ada guru-guru yang mencoba melakukan inovasi dan modifikasi dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan agar lebih kontekstual dan menarik bagi siswa. Salah satu bentuk inovasi yang diamati adalah pelaksanaan simulasi musyawarah kelas, di mana guru membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil dan mengajak mereka untuk mendiskusikan topik tertentu, seperti rencana kegiatan kelas atau pemecahan masalah yang terjadi di lingkungan sekolah. Melalui simulasi ini, siswa diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat, mendengarkan pandangan teman, serta mencari solusi bersama secara musyawarah. Kegiatan ini bukan hanya membantu siswa memahami

konsep demokrasi secara lebih konkret, tetapi juga melatih keterampilan komunikasi, kerja sama, dan toleransi dalam perbedaan pendapat. Selain itu, ada guru yang memanfaatkan proyek kebersihan sekolah sebagai media pembelajaran kewarganegaraan, di mana siswa diajak untuk berpartisipasi aktif menjaga kebersihan lingkungan sekolah dengan membentuk kelompok piket, menyusun jadwal kerja, dan melaksanakan tugas secara bergilir. Proyek semacam ini menjadi sarana nyata bagi siswa untuk memahami bahwa kewarganegaraan bukan hanya berkaitan dengan hak-hak yang dimiliki, tetapi juga dengan kewajiban dan tanggung jawab mereka sebagai anggota komunitas sekolah.

Kendati demikian, upaya inovasi yang dilakukan guru-guru tersebut masih bersifat sporadis dan belum menjadi praktik yang terintegrasi secara sistematis dalam pembelajaran kewarganegaraan di sekolah dasar. Kegiatan simulasi musyawarah atau proyek kebersihan seringkali dilakukan hanya pada momen-momen tertentu dan belum menjadi bagian dari perencanaan pembelajaran yang berkesinambungan. Hambatan yang dihadapi guru dalam mengimplementasikan inovasi ini antara lain adalah keterbatasan waktu pembelajaran akibat padatnya kurikulum, kurangnya dukungan fasilitas dan sumber belajar yang memadai, serta beban administrasi yang menguras energi guru. Selain

itu, belum adanya pelatihan khusus yang berfokus pada pengembangan metode pembelajaran kewarganegaraan yang kreatif membuat guru cenderung kembali pada metode konvensional yang dianggap lebih aman dan mudah diimplementasikan. Akibatnya, meskipun ada inisiatif untuk memperkaya pengalaman belajar siswa melalui pendekatan yang lebih partisipatif, praktik tersebut belum mampu menggeser paradigma dominan pembelajaran kewarganegaraan di sekolah dasar yang masih terlalu berpusat pada guru. Kondisi ini menegaskan perlunya intervensi yang terencana, baik dalam bentuk pelatihan guru, pengembangan kurikulum yang lebih fleksibel, maupun penyediaan sumber daya yang mendukung, agar inovasi pembelajaran kewarganegaraan dapat berkembang menjadi praktik yang konsisten dan berdampak nyata bagi pembentukan warga negara muda yang kritis, partisipatif, dan bertanggung jawab.

2) Tantangan Implementasi

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar guru pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar mengungkapkan bahwa keterbatasan waktu menjadi salah satu kendala paling signifikan yang mereka hadapi dalam mengimplementasikan pembelajaran yang ideal. Beban kurikulum yang padat membuat alokasi waktu untuk pendidikan kewarganegaraan menjadi relatif singkat, sehingga guru merasa

terpaksa memadatkan materi agar dapat mencakup seluruh kompetensi dasar yang ditargetkan. Kondisi ini mendorong mereka untuk memilih metode penyampaian materi yang lebih cepat, seperti ceramah atau pemberian tugas hafalan, daripada metode partisipatif yang memerlukan waktu lebih lama untuk membangun interaksi, diskusi, atau simulasi demokrasi di kelas. Di sisi lain, beban administrasi yang cukup berat, seperti kewajiban menyusun rencana pembelajaran, mengisi laporan kemajuan siswa, hingga pelaporan kegiatan sekolah ke pihak manajemen, semakin mengurangi kesempatan guru untuk merancang dan melaksanakan strategi pembelajaran inovatif. Dampaknya, banyak guru yang mengakui bahwa mereka sebenarnya memiliki keinginan untuk membuat pembelajaran kewarganegaraan lebih menarik, tetapi terhambat oleh keterbatasan waktu dan energi yang mereka miliki.

Selain keterbatasan waktu dan beban administrasi, kurangnya sumber daya pembelajaran yang memadai juga menjadi faktor yang menghambat guru dalam mengembangkan metode pengajaran yang kreatif. Sebagian besar sekolah dasar, terutama di daerah yang jauh dari pusat kota, masih mengalami keterbatasan dalam menyediakan media pembelajaran modern, seperti perangkat teknologi, bahan ajar interaktif, atau akses ke sumber informasi digital yang relevan. Bahkan, untuk kegiatan sederhana

seperti simulasi musyawarah kelas atau proyek berbasis komunitas, guru seringkali harus mengeluarkan biaya pribadi atau menggunakan bahan seadanya agar kegiatan tetap terlaksana. Keterbatasan ini menyebabkan guru sulit memberikan pengalaman belajar yang kaya dan kontekstual kepada siswa. Akibatnya, pembelajaran kewarganegaraan seringkali terjebak pada pengajaran berbasis teks dan hafalan, tanpa memberikan ruang yang cukup bagi siswa untuk mengasah keterampilan kewarganegaraan secara nyata. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memengaruhi efektivitas pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk warga negara muda yang aktif, kritis, dan peduli terhadap lingkungannya.

Guru juga menyoroti minimnya pelatihan khusus yang secara spesifik membekali mereka dengan keterampilan mengembangkan metode pembelajaran kewarganegaraan yang inovatif dan relevan dengan tantangan zaman. Pelatihan yang ada selama ini umumnya bersifat umum dan lebih fokus pada pemenuhan aspek administratif kurikulum, bukan pada penguatan kapasitas guru dalam mendesain pembelajaran partisipatif dan berbasis proyek yang kontekstual. Akibatnya, banyak guru yang masih mengandalkan pengetahuan dan metode pengajaran yang mereka pelajari sejak lama, tanpa memiliki kesempatan untuk memperbarui keterampilan mereka sesuai perkembangan terkini. Padahal,

pendidikan kewarganegaraan yang efektif di era modern memerlukan metode pengajaran yang mampu menghubungkan materi pelajaran dengan isu-isu kontemporer, serta memfasilitasi siswa untuk berperan aktif dalam diskusi dan pemecahan masalah yang relevan dengan kehidupan nyata. Tanpa dukungan pelatihan yang tepat, guru sulit mengubah paradigma pembelajaran dari sekadar transfer pengetahuan menjadi proses pembentukan sikap dan keterampilan warga negara yang sesungguhnya.

Dalam konteks era digital, tantangan yang dihadapi guru semakin kompleks karena mereka juga dituntut untuk mengintegrasikan isu-isu kontemporer seperti literasi digital, etika bermedia sosial, dan keamanan berinternet ke dalam pembelajaran kewarganegaraan. Banyak guru mengakui bahwa meskipun mereka menyadari pentingnya materi tersebut, mereka belum memiliki panduan yang jelas atau strategi pengajaran yang terstruktur untuk mengajarkannya kepada siswa sekolah dasar. Sebagian guru bahkan merasa kurang percaya diri karena keterbatasan penguasaan teknologi atau minimnya pengalaman dalam menggunakan media digital sebagai alat pembelajaran. Padahal, fenomena seperti penyebaran hoaks, perundungan daring (*cyberbullying*), dan ujaran kebencian di media sosial sudah mulai menyentuh kehidupan anak-anak sejak usia sekolah dasar. Hal ini membuat urgensi integrasi

literasi digital ke dalam pendidikan kewarganegaraan semakin tinggi. Namun, tanpa dukungan pelatihan yang memadai, sumber daya yang relevan, dan panduan kurikulum yang jelas, guru akan terus menghadapi kesulitan dalam menjembatani materi kewarganegaraan konvensional dengan realitas kehidupan digital siswa di masa kini.

3) Implikasi bagi Pengembangan Siswa

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar guru pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar mengungkapkan bahwa keterbatasan waktu menjadi salah satu kendala paling signifikan yang mereka hadapi dalam mengimplementasikan pembelajaran yang ideal. Beban kurikulum yang padat membuat alokasi waktu untuk pendidikan kewarganegaraan menjadi relatif singkat, sehingga guru merasa terpaksa memadatkan materi agar dapat mencakup seluruh kompetensi dasar yang ditargetkan. Kondisi ini mendorong mereka untuk memilih metode penyampaian materi yang lebih cepat, seperti ceramah atau pemberian tugas hafalan, daripada metode partisipatif yang memerlukan waktu lebih lama untuk membangun interaksi, diskusi, atau simulasi demokrasi di kelas. Di sisi lain, beban administrasi yang cukup berat, seperti kewajiban menyusun rencana pembelajaran, mengisi laporan kemajuan siswa, hingga pelaporan kegiatan sekolah ke pihak manajemen, semakin mengurangi

kesempatan guru untuk merancang dan melaksanakan strategi pembelajaran inovatif. Dampaknya, banyak guru yang mengakui bahwa mereka sebenarnya memiliki keinginan untuk membuat pembelajaran kewarganegaraan lebih menarik, tetapi terhambat oleh keterbatasan waktu dan energi yang mereka miliki.

Selain keterbatasan waktu dan beban administrasi, kurangnya sumber daya pembelajaran yang memadai juga menjadi faktor yang menghambat guru dalam mengembangkan metode pengajaran yang kreatif. Sebagian besar sekolah dasar, terutama di daerah yang jauh dari pusat kota, masih mengalami keterbatasan dalam menyediakan media pembelajaran modern, seperti perangkat teknologi, bahan ajar interaktif, atau akses ke sumber informasi digital yang relevan. Bahkan, untuk kegiatan sederhana seperti simulasi musyawarah kelas atau proyek berbasis komunitas, guru seringkali harus mengeluarkan biaya pribadi atau menggunakan bahan seadanya agar kegiatan tetap terlaksana. Keterbatasan ini menyebabkan guru sulit memberikan pengalaman belajar yang kaya dan kontekstual kepada siswa. Akibatnya, pembelajaran kewarganegaraan seringkali terjebak pada pengajaran berbasis teks dan hafalan, tanpa memberikan ruang yang cukup bagi siswa untuk mengasah keterampilan kewarganegaraan secara nyata. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memengaruhi efektivitas

pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk warga negara muda yang aktif, kritis, dan peduli terhadap lingkungannya.

Guru juga menyoroti minimnya pelatihan khusus yang secara spesifik membekali mereka dengan keterampilan mengembangkan metode pembelajaran kewarganegaraan yang inovatif dan relevan dengan tantangan zaman. Pelatihan yang ada selama ini umumnya bersifat umum dan lebih fokus pada pemenuhan aspek administratif kurikulum, bukan pada penguatan kapasitas guru dalam mendesain pembelajaran partisipatif dan berbasis proyek yang kontekstual. Akibatnya, banyak guru yang masih mengandalkan pengetahuan dan metode pengajaran yang mereka pelajari sejak lama, tanpa memiliki kesempatan untuk memperbarui keterampilan mereka sesuai perkembangan terkini. Padahal, pendidikan kewarganegaraan yang efektif di era modern memerlukan metode pengajaran yang mampu menghubungkan materi pelajaran dengan isu-isu kontemporer, serta memfasilitasi siswa untuk berperan aktif dalam diskusi dan pemecahan masalah yang relevan dengan kehidupan nyata. Tanpa dukungan pelatihan yang tepat, guru sulit mengubah paradigma pembelajaran dari sekadar transfer pengetahuan menjadi proses pembentukan sikap dan keterampilan warga negara yang sesungguhnya.

Dalam konteks era digital, tantangan yang dihadapi guru semakin kompleks karena mereka juga dituntut untuk mengintegrasikan isu-isu kontemporer seperti literasi digital, etika bermedia sosial, dan keamanan berinternet ke dalam pembelajaran kewarganegaraan. Banyak guru mengakui bahwa meskipun mereka menyadari pentingnya materi tersebut, mereka belum memiliki panduan yang jelas atau strategi pengajaran yang terstruktur untuk mengajarkannya kepada siswa sekolah dasar. Sebagian guru bahkan merasa kurang percaya diri karena keterbatasan penguasaan teknologi atau minimnya pengalaman dalam menggunakan media digital sebagai alat pembelajaran. Padahal, fenomena seperti penyebaran hoaks, perundungan daring (*cyberbullying*), dan ujaran kebencian di media sosial sudah mulai menyentuh kehidupan anak-anak sejak usia sekolah dasar. Hal ini membuat urgensi integrasi literasi digital ke dalam pendidikan kewarganegaraan semakin tinggi. Namun, tanpa dukungan pelatihan yang memadai, sumber daya yang relevan, dan panduan kurikulum yang jelas, guru akan terus menghadapi kesulitan dalam menjembatani materi kewarganegaraan konvensional dengan realitas kehidupan digital siswa di masa kini.

4) Strategi Peningkatan

Salah satu strategi yang direkomendasikan untuk meningkatkan efektivitas

pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar adalah dengan mengadopsi pendekatan pembelajaran berbasis proyek (*project-based learning*) yang secara langsung terkait dengan isu-isu nyata di lingkungan sekolah maupun masyarakat sekitar. Melalui pendekatan ini, siswa tidak hanya mempelajari konsep-konsep kewarganegaraan secara teoritis, tetapi juga menerapkannya dalam konteks kegiatan yang bermakna, seperti program penghijauan sekolah, kampanye hemat energi, atau pengelolaan sampah berbasis pemilahan. Kegiatan proyek ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkolaborasi, mengambil inisiatif, dan memecahkan masalah secara kreatif sambil menginternalisasi nilai-nilai tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap lingkungan. Selain itu, pembelajaran berbasis proyek mendorong terjadinya integrasi lintas mata pelajaran, di mana keterampilan yang mereka pelajari di bidang lain seperti matematika, sains, dan bahasa dapat diaplikasikan untuk mendukung keberhasilan proyek kewarganegaraan yang sedang dijalankan. Dengan demikian, proses belajar menjadi lebih kontekstual, relevan, dan bermakna bagi kehidupan siswa.

Strategi kedua yang tidak kalah penting adalah memanfaatkan simulasi demokrasi dalam kegiatan pembelajaran kewarganegaraan, yang dapat diwujudkan melalui praktik-praktik sederhana namun

sarat makna, seperti pemilihan ketua kelas, pembentukan struktur organisasi kelas, atau musyawarah kelompok untuk menentukan keputusan bersama. Melalui kegiatan ini, siswa berkesempatan mengalami langsung proses demokratis, mulai dari pengajuan calon, penyusunan visi-misi, kampanye, pemungutan suara, hingga pengumuman hasil pemilihan yang transparan. Simulasi semacam ini melatih keterampilan siswa dalam berkomunikasi, bernegosiasi, menghargai perbedaan pendapat, serta memahami konsekuensi dari keputusan yang diambil secara kolektif. Selain itu, pengalaman ini juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip demokrasi seperti keadilan, kesetaraan, dan partisipasi aktif. Dengan adanya pengalaman praktik demokrasi di lingkungan kelas, siswa dapat mengembangkan kesadaran bahwa mereka memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan kelompok, sekaligus belajar untuk bertanggung jawab terhadap hasil keputusan bersama.

Integrasi teknologi edukasi menjadi strategi ketiga yang direkomendasikan, mengingat pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang telah memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Dalam konteks pembelajaran kewarganegaraan, teknologi dapat dimanfaatkan untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif, menarik, dan sesuai dengan

karakteristik generasi digital saat ini. Guru dapat menggunakan permainan edukasi berbasis kewarganegaraan yang tersedia secara daring untuk mengajarkan konsep-konsep seperti hak dan kewajiban warga negara, proses pengambilan keputusan, atau nilai-nilai kebersamaan. Selain itu, penggunaan platform pembelajaran digital memungkinkan siswa untuk mengakses materi secara mandiri, berpartisipasi dalam forum diskusi daring, dan mengerjakan tugas berbasis proyek dengan dukungan sumber daya digital yang kaya. Integrasi teknologi ini juga membuka peluang bagi guru untuk mengaitkan pembelajaran kewarganegaraan dengan isu-isu aktual yang sedang berkembang di masyarakat, sehingga siswa tidak hanya mempelajari nilai-nilai dasar, tetapi juga mampu menerapkannya dalam konteks dunia nyata yang terus berubah.

Agar strategi-strategi tersebut dapat diimplementasikan secara efektif, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, baik di tingkat sekolah maupun kebijakan pendidikan yang lebih luas. Sekolah perlu memberikan keleluasaan bagi guru untuk berinovasi, misalnya melalui penyesuaian jadwal pembelajaran yang memungkinkan pelaksanaan proyek atau kegiatan simulasi secara optimal. Selain itu, pelatihan khusus bagi guru mengenai desain pembelajaran berbasis proyek, simulasi demokrasi, dan pemanfaatan teknologi edukasi menjadi sangat penting untuk memastikan keberhasilan strategi ini. Pemerintah

daerah dan dinas pendidikan dapat berperan dalam menyediakan fasilitas pendukung, seperti perangkat teknologi, akses internet, dan sumber belajar digital yang berkualitas. Dengan dukungan yang memadai, strategi pembelajaran kewarganegaraan dapat bertransformasi dari sekadar penyampaian materi ke arah pembentukan kompetensi nyata, sehingga siswa sekolah dasar tidak hanya memahami konsep kewarganegaraan secara teoritis, tetapi juga mampu mempraktikkannya secara aktif dalam kehidupan sehari-hari.

E. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar saat ini masih menghadapi tantangan dalam penerapan metode pembelajaran yang partisipatif dan kontekstual. Meskipun kurikulum sudah memuat materi kewarganegaraan secara komprehensif, implementasinya masih dominan berorientasi pada hafalan. Akibatnya, siswa kurang terlatih dalam keterampilan berpikir kritis, berpartisipasi aktif, dan memahami peran mereka sebagai warga negara.

Untuk itu, diperlukan reformasi pendekatan pembelajaran dengan menekankan pada pengalaman langsung, dialog kelas, dan proyek yang relevan dengan kehidupan siswa. Guru perlu dibekali pelatihan yang memadai agar mampu menerapkan metode inovatif, memanfaatkan teknologi, dan

mengintegrasikan isu kontemporer ke dalam pembelajaran. Pemerintah dan lembaga pendidikan juga diharapkan memberikan dukungan sumber daya serta kebijakan yang mendorong terciptanya budaya belajar demokratis sejak dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Althof, W., & Berkowitz, M. W. (2006). Moral education and character education: Their relationship and roles in citizenship education. *Journal of Moral Education*, 35(4), 495–518.
- Arthur, J., Davies, I., & Hahn, C. (Eds.). (2016). *The SAGE handbook of education for citizenship and democracy*. SAGE Publications.
- Branson, M. S. (1999). *Making the Case for Civic Education: Where We Stand at the End of the 20th Century*. Center for Civic Education.
- Budimansyah, D. (2010). *Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan untuk Membangun Karakter Bangsa*. Bandung: Widya Aksara Press.
- Banks, J. A. (2017). *Diversity and citizenship education: Global perspectives* (2nd ed.). Jossey-Bass.
- Bennett, W. J. (2011). *The book of virtues: A treasury of great moral stories*. Simon & Schuster.
- Blevins, B., LeCompte, K., & Wells, S. (2016). Innovations in civic education: Preparing young citizens for the 21st century. *Social Studies Research and Practice*, 11(3), 1–15.
- Broom, C. (2011). From critical thinking to responsible action: Citizenship education for a new millennium. *Citizenship Teaching & Learning*, 7(3), 191–207.
- Davies, I., Gorard, S., & McGuinn, N. (2005). Citizenship education and character education: Similarities and contrasts. *British Journal of Educational Studies*, 53(3), 341–358.
- Dewey, J. (1938). *Experience and education*. Macmillan.
- Hoskins, B., Villalba, E., & Van Nijlen, D. (2015). Learning citizenship through social participation outside and inside school: An international, multilevel study of young people's learning of citizenship. *British Educational Research Journal*, 41(5), 1–23.
- Kolb, D. A. (2014). *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development* (2nd ed.). Pearson Education.
- Kerr, D., Sturman, L., Schulz, W., & Burge, B. (2010). *ICC Research: ICCS 2009 European report: Civic*

- knowledge, attitudes, and engagement among lower-secondary students in 24 European countries. International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA).
- Kirlin, M. (2003). The role of civic skills in fostering civic engagement. *CIRCLE Working Paper 06*. University of Maryland.
- Milner, H. (2010). *The Internet generation: Engaged citizens or political dropouts*. University Press of New England.
- Osler, A., & Starkey, H. (2006). Education for democratic citizenship: A review of research, policy and practice 1995–2005. *Research Papers in Education*, 21(4), 433–466.
- Schulz, W., Ainley, J., Fraillon, J., Kerr, D., & Losito, B. (2010). *ICCS 2009 international report: Civic knowledge, attitudes, and engagement among lower-secondary school students in 38 countries*. International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA).
- Torney-Purta, J., Lehmann, R., Oswald, H., & Schulz, W. (2001). *Citizenship and education in twenty-eight countries: Civic knowledge and engagement at age fourteen*. International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA).
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press.
- Winataputra, U. S., & Budimansyah, D. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Internasional: Konsep, Teori, dan Praktik*. Bandung: Widya Aksara Press.
- Westheimer, J., & Kahne, J. (2004). What kind of citizen? The politics of educating for democracy. *American Educational Research Journal*, 41(2), 237–269.